

# RELASI GENDER ANTAR ANGGOTA KELUARGA: Pengalaman Tiga Perempuan dalam Perspektif Agama dan Perubahan Sosial

Siti Syamsiyatun

*Staf Pengajar  
pada Fakultas  
Dakwah UIN  
Sunan Kalijaga  
Yogyakarta*

## Abstract

During the course of women's movement history in Indonesia since a century ago, 'educated' women have had assumed significant roles. They have become one of the most important agents to promote social changes in Indonesian community, particularly in the areas affecting women's standing in society, such as improving and extending education, women's representation in the parliament, challenging the practice of child marriage and women in the work force. This paper attempts to portray women's empirical experiences in dealing with their domestic affairs with particular emphasis given to the nature of their gender relationships with husband and parents in law. The women participating in this preliminary study do not represent the 'working class' who has limited qualifications in terms of training and professional skills. Far from those characteristics, they all hold higher degree in education and have stable career as professionals. Based on several series of interviews, the study finds that while the women have achieved greater social and economic status and independency within their public life, the condition of the gender relation within the confine of family household remains the same. It is found that women have been assigned greater responsibility for maintaining the relationships within their own immediate family as well as with their in laws'. Not only do these women experience double burdens, they are exposed to multi burdens, in terms of gender relations with their in laws.

**Kata Kunci:** *Perempuan Karier, Birr al-Wālidayn, Perubahan Sosial*

## A. Pendahuluan

Keluarga dan agama (dalam pengertian-nya yang luas) merupakan dua institusi sosial yang paling mendasar dalam masyarakat manusia yang telah berlangsung sejak zaman primitif hingga kini.

Banyak ahli sosiologi yang memprediksi bahwa institusi agama dan keluarga akan tergusur dengan semakin menguatnya trend modernisme yang mendewakan rasionalitas pada abad ke delapan belas hingga paroh pertama abad kedua puluh.<sup>1</sup> Jauh dari yang diperkirakan para sosiolog di atas, pada awal abad kedua puluh satu ini kita justru menyaksikan munculnya fenomena keagamaan yang menguat. Peristiwa peruntuhan menara kembar World Trade Centre yang menjadi lambang supremasi Negara sekuler dan kapitalis Amerika Serikat pada 11 September 2001, terlepas dari penilaian moralitas apakah baik atau buruk bagi kemanusiaan, telah menggugah rasa keberagaman masyarakat dunia yang selama ini menganggap bahwa agama tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan negara. Dalam waktu yang bersamaan masyarakat moderen dihadapkan dengan persoalan moralitas dan 'keagamaan' yang lain: kloning manusia, munculnya tuntutan pengesahan/pengakuan perkawinan sejenis, dan adopsi anak bagi pasangan homoseksual, misalnya. Ketika lembaga sosial perkawinan dan keluarga, yang secara tradisional merepresentasikan kehadiran agama di negara-negara sekuler mendapat tantangan baru seperti pemberkatan perkawinan homoseksual, beberapa pemimpin mereka misalnya George W. Bush di Amerika Serikat, dan John Howard di Australia, pada akhirnya terpaksa menengok kembali dan mencari pegangan pada sendi-sendi agama.<sup>2</sup>

Untuk dapat bertahan menjadi institusi yang relevan bagi umat manusia pada era ini agama dan keluarga tentu saja telah melakukan banyak transformasi dan adaptasi dari masa ke masa, dan dari satu kelompok masyarakat ke masyarakat yang lain. Dalam kasus masyarakat Muslim, dapat ditemui banyak varian dalam pelaksanaan perkawinan yang meliputi proses pinangan, ijab Kabul, pemberian mahar dan sebagainya, hingga masalah perceraian, meskipun mereka semua mendasarkan aturan itu pada syari'at Islam.<sup>3</sup> Perbedaan yang lebih jauh lagi dapat ditemukan

---

<sup>1</sup> Lihat misalnya prediksi para sosiolog terkemuka berikut Karl Marx and Frederick Engels, *On Religion* (New York: Schocken Books, 1964). James A. Beckford, *Religion and Advanced Industrial Society* (London: Unwin Hyman, 1989). Emile Durkheim, *Emile Durkheim: On Morality and Society*. Edited by R. Bellah (Chicago: University of Chicago Press, 1973). Frederick Engels, *The Origin of the Family, Private Property and the State* (New York: International Publishers, [1884, 1891] 1973).

<sup>2</sup> *The Herald Sun*, 28-05-2004.

<sup>3</sup> Informasi lebih lanjut pada masalah usia anak perempuan dapat menikah, sebab dan proses perceraian di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia lihat Susan Blackburn and Sharon Bessell, "Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth Century Indonesia" in *Indonesia* (63, April 1997.). Hisako Nakamura, *Divorce in Java: A Study of the Dissolution of Marriage Among Javanese Muslims* (Yogyakarta: Gadjah Mada University

pada aspek-aspek yang menyangkut sistem pengelolaan rumah tangga dan hubungan antar anggota keluarga.<sup>4</sup> Pada umumnya, berpedoman pada pemahaman statis terhadap pesan Q.S. Al-Nisā': 34, masyarakat Muslim mengukuhkan konsep bahwa suami adalah pemimpin, kepala keluarga, dan isteri adalah anggota yang harus selalu dipimpin, dididik dan diawasi kerana perempuan adalah makhluk yang lemah dan sumber dari segala fitnah.<sup>5</sup> Ideologi yang mengatur norma relasi gender antara suami sebagai pemimpin keluarga dan isteri yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu secara legal-politis diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan diundangkannya UU Perkawinan 1974.

Pemerintahan Order Baru yang melegalisasi ideologi gender di Indonesia yang menyeragamkan dan memroyeksikan posisi perempuan sebagai istri dan ibu yang tidak pernah mempertanyakan hak dan otoritas politiknya,<sup>6</sup> sebenarnya secara sosio-historis telah mengingkari kemajemukan status, peran dan kemampuan para perempuan yang diakui oleh masyarakat mereka masing-masing.<sup>7</sup> Relasi gender yang distandardkan

---

Press, 1983). Z. Anwar, "Multi-Fundamentalism and Feminist resistance in Mauritius" In *Muslim Feminism and Feminist Movement: South East Asia*, edited by A. Samiuddin and R. Khanam. (Delhi, India: Global Vision Publishing House, 2002). Untuk masyarakat Iran, lihat Haleh Afshar, *Islam and Feminism: An Iranian Case-study*. New York: Palgrave, 1998).

<sup>4</sup> Lihat pada hasil penelitian berikut Norma Sullivan, *Masters and Managers: A Study of Gender Relations in Urban Java*. (St Leonards, NSW: Allen & Unwin, 1994). Aihwa Ong and Michael G. Peletz (eds), *Bewitching Women, Pious Men. Gender and Body Politics in Southeast Asia* (Berkeley: University of California Press, 1995). Saskia Wieringa, "The matrilinearity and women's interests: the Minangkabau of Western Sumatera" In *Subversive Women. Women's Movements in Africa, Asia, Latin America and the Carribean*, edited by S. Wieringa. London: Zed Books, 1995).

<sup>5</sup> Misalnya, pandangan Imam Khomeini dan para pendukungnya mengenai perempuan Masoud Kazemzadeh, *Islamic Fundamentalism, Feminism, and Gender Inequality in Iran under Khomeini* (Lanham, Maryland: University Press of America, 2002). Valentine M. Moghadam (Ed.), *Gender and National Identity. Women and Politics in Muslim Societies* (London: Zed Books, 1994). Untuk beberapa pandangan ulama di Asia Tenggara, lihat Rebecca C. Foley, *The Challenge of Contemporary Muslim Women Activists in Malaysia*, (Clayton, VIC: School of Political and Social Inquiry, Monash University, 2001). Aihwa Ong, and Michael G. Peletz (Eds.), *Bewitching Women, Pious Men. Gender and Body Politics in Southeast Asia* (Berkeley: University of California Press, 1995).

<sup>6</sup> Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis, "Ibuisim and priyayization: Path to power" In *Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions*, edited by E. Locher-Scholten and A. Niehof (Dordrecht-Holland: Foris Publication, 1987), 44.

<sup>7</sup> Kathryn Robinson menengarai adanya perbedaan peran dan status perempuan Muslim di Jawa, Aceh dan Bugis. Kathryn Robinson, "Gender, Islam and culture in Indonesia" In *Love, Sex and Power*, edited by S. Blackburn (Melbourne: Monash University Press, 2001), 17-30. Demikian pula Susan Blackburn. Lebih jauh kepentingan perempuan juga berbeda tidak hanya berdasarkan etnis, tetapi juga profesi, agama dan kelas sosial dan ekonomi. Susan Blackburn,

bahwa istri adalah pengatur rumah tangga yang dibangun pada era tahun tujuh puluhan, telah membuat perempuan Indonesia mengalami kegamangan dan dihantui rasa bersalah dalam meniti karir. Istri-istri yang bekerja, dan sebagian besar mereka bekerja untuk menghidupi keluarga,<sup>8</sup> memiliki beban ganda: tuntutan mengatur rumah tangga dan tuntutan mencapai hasil maksimum di tempat kerja. Beban ini akan menjadi multi, bila cakupan keluarga itu kita perluas ke atas dengan memasukkan diktum agama mengenai *'birr al-wālidayn.'* Mengatur keharmonisan hubungan antar keluarga, antara istri dan suami, orangtua dengan anak, cucu dengan kakek-nenek, dan suami istri dengan mertua seringkali dikategorikan pada proses pendidikan anak dalam ranah domestik, dus menjadi tanggung jawab istri.

Makalah ini secara khusus ingin menggali bagaimana relasi gender antar anggota keluarga sebagaimana dipraktikkan oleh perempuan Muslim Indonesia masa kini. Yang menjadi fokus bahasan adalah relasi gender horisontal dan vertikal antar anggota keluarga: suami dan istri, dan suami-isteri dengan mertua mereka. Masalah utama yang akan dianalisis adalah otonomi perempuan dalam kehidupan perkawinan mereka, dan bagaimana relasi gender dengan suami, dan mertua mereka dibangun. Pertanyaan menjadi menarik sebab secara empirik subjek penelitian ini bukan perempuan yang merepresentasikan ideologi istri pada UU Perkawinan 1974. Mereka adalah perempuan-perempuan yang kesemuanya memiliki karir dan pendidikan tinggi. Dalam sejarah pergerakan perempuan di Indonesia sejak awal abad kedua puluh diperoleh bukti yang kuat bahwa sebagian besar penggerak motornya adalah mereka yang berpendidikan;<sup>9</sup> oleh karena itu pengalaman para perempuan yang

---

“Western feminists observe Asian women: An example from the Dutch East Indies” In *Women Creating Indonesia The First Fifty Years*, edited by J. G. Taylor (Clayton, VIC: Monash Asia Institute, Monash University, 1997). Susan Blackburn, “Gender interests and Indonesian democracy” In *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, edited by D. Bouchier and J. Legge. Clayton, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1994.

<sup>8</sup> Hasil riset Chamsiah Djamal (2000) pada peran dan kontribusi wanita yang bekerja pada sector informal untuk kelangsungan hidup keluarga mereka. Chamsiah Djamal, “Women in the informal sector: A forgotten’ workforce” In *Indonesian Women: The Journey Continues*, edited by M. Oey-Gardiner and C. Bianpoen (Canberra: Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University, 2000).

<sup>9</sup> Lihat hasil-hasil penelitian berikut Darmiyanti Mukhtar, *The Rise of the Indonesian Movement in The New Order State* (Perth, Western Australia.: Murdoch University 1999). Hidayat Mukmin, *Beberapa Aspek Perjuangan Wanita di Indonesia. Suatu Pendekatan Diskriptif Komparatif* (Bandung: Binacipta, 1980). Cora Vreede-De Stuers, *The Indonesian Women, Struggles and Achievements* (Mouton: The Hague, 1960). Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1984).

menjadi subyek studi ini dapat menjadi sebuah katalisator suatu proses perubahan dalam ranah domestik/keluarga pada keluarga Muslim masa kini. Dalam pembahasannya, relasi gender tersebut akan dilihat dengan menggunakan perspektif perubahan sosial dan agama. Adapun data yang digunakan dalam studi ini diperoleh melalui wawancara dengan tiga orang perempuan yang hasilnya dianalisis secara kualitatif.

## **B. Konteks dan Metode Penelitian**

Studi ini bermula dari seri 'obrolan makan siang' yang penulis lakukan dengan beberapa teman Indonesia yang sedang menempuh studi pasca sarjana di sebuah universitas di Australia. Topik pembicaraan kami biasanya campur aduk, mulai dari hasil temuan riset, supervisor, acara konferensi, harga bahan pangan, sampai yang bersifat personal: anak, suami, orang tua, mertua, dan seterusnya. Berbekal beberapa teori yang dikembangkan di wilayah disiplin ilmu *women's studies*, penulis mengajukan diri untuk 'memotret' pengalaman mereka menggunakan 'kamera' yang dipasangi filter 'gender.' Ketika ide itu penulis munculkan, mereka serta merta mendukung dan bersedia menjadi responden dengan dua syarat: nama mereka harus disamarkan, dan hasil penelitian tidak boleh dipresentasikan di universitas tempat kami belajar. Setelah mendapat 'informed consent' secara lisan dari para calon responden (10 orang) penulis selanjutnya melakukan seleksi untuk menemukan responden yang memenuhi kriteria untuk studi ini. Karena secara spesifik penulis ingin melihat relasi gender antar anggota keluarga, baik secara horisontal maupun vertikal, maka responden paling tidak harus memiliki karakteristik sebagai berikut: beragama Islam, menikah dengan suami masih hidup, bekerja, mempunyai anak, dan mempunyai orang tua dan mertua yang masih hidup. Dari sepuluh calon responden yang telah menyatakan kesediaannya, ternyata hanya tiga orang yang memenuhi kriteria yang diinginkan. Menghormati 'kontrak' kesepakatan yang telah penulis lakukan, semua nama-nama yang digunakan dalam studi ini adalah nama samaran. Reponden pertama, Tia -40 tahun, memiliki dua orang anak, asal Jakarta, bekerja sebagai konsultan di sebuah biro konsultasi manajemen perusahaan yang terkenal di Jakarta. Tia mengaku dibesarkan dalam keluarga yang taat mengikuti beberapa tradisi Jawa, juga taat menjalankan ibadah sebagai Muslim. Responden kedua, Diah -42 tahun, seorang ibu dengan 3 orang anak, dosen senior di sebuah perguruan tinggi negeri di Surabaya. Diah dan suaminya, menurut penilaiannya sendiri, dapat dikatakan dari keluarga 'santri.' Terakhir, Anita -45 tahun, memiliki seorang anak, dosen di perguruan tinggi bergengsi di Bandung. Secara

terus terang Anita menyatakan bahwa ia masuk kategori 'abangan' kalau kita menggunakan klasifikasi Geertz (1976). Pengalaman para perempuan ini selanjutnya digali melalui wawancara yang dilakukan beberapa kali antara tanggal 10-29 Mei 2004, serta pengamatan langsung terhadap interaksi mereka dengan keluarga (terbatas pada suami dan anak) dimana keadaan memungkinkan tanpa mengganggu privasi keluarga mereka.

### C. Keluarga, Agama dan Perubahan Sosial

Dibandingkan dengan institusi sosial yang lain seperti sekolah, partai politik dan organisasi massa misalnya, lembaga perkawinan dan keluarga adalah yang paling tua, dan pertama dimiliki oleh seseorang. Barangkali karena dekatnya mereka dengan kita, membuat institusi tersebut seringkali luput dari perhatian. Lembaga keluarga telah mengalami banyak perubahan baik pada segi bentuk maupun fungsinya dari masa ke masa. Pada dasarnya terbentuknya satuan keluarga baru, dimulai dengan perkawinan antara dua orang yang memiliki keinginan untuk hidup bersama. Ketentuan perkawinan dan tata cara penyelenggaraannya tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, atau dari satu waktu ke waktu yang lain. Ada yang mendasarkan perkawinan pada adat istiadat yang diwarisi secara turun temurun, ada pula yang melaksanakannya atas dasar sendi-sendi ajaran agama.<sup>10</sup> Dalam Islam, perkawinan merupakan persekutuan dua orang, laki-laki dan perempuan, yang sakral dan kokoh, yang mana hubungan keduanya dilandaskan pada *mawaddah* dan *rahmah* untuk mencapai *sakinah* (Q.S. Al-Nisā': 21, Rum:21). Perkawinan juga mengandung misi transenden dalam menjelmakan fungsi duniawinya.<sup>11</sup>

Selanjutnya apabila suami dan isteri telah memiliki anak keturunan, maka hubungan orang tua dan anak merupakan hubungan yang paling utama dan pertama yang dikenal oleh seorang anak. Hubungan ini terus berlangsung sejak seorang anak lahir hingga salah satu di antara mereka –anak atau orang tua, meninggal dunia. Hubungan antar keduanya secara

---

<sup>10</sup> Lihat pada Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984). Saskia Wieringa, "The matrilinearity and women's interests: the Minangkabau of Western Sumatera" In *Subversive Women. Women's Movements in Africa, Asia, Latin America and the Carribean*, edited by S. Wieringa (London: Zed Books, 1995). Li-shou Yang, Arland Thornton, and Thomas Fricke, "Religion and family formation in Taiwan: The decline of ancestral authority" In *Family, Religion and Social Change in Diverse Societies*, edited by J. G. Pankhurst and S. K. Houseknecht (Oxford: Oxford University Press, 2000).

<sup>11</sup> M.F. Zenrif, "Kepemimpinan Keluarga dalam Kajian Kontekstual" dalam *Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam* 3 (1), 2004, 48-53.

normatif tidak terputus dengan munculnya relasi sosial yang baru yang dibangun oleh mereka; misalnya oleh adanya relasi dagang, persahabatan, bahkan relasi perkawinan yang baru sekalipun. Agama Islam memandang penting terhadap kebaikan hubungan anak dan orang tua sebagaimana dengan indahna difirmankan oleh Allah dalam Q.S. Luqmān: 14-15; Al-Isrā': 23, 24. Sabda Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa anak soleh yang senantiasa memanjatkan doa untuk kedua orangtuanya yang sudah meninggal merupakan 'tambang' amal yang akan terus menghasilkan pahala bagi orang tua meskipun mereka telah meninggal dunia, turut memperkuat pentingnya relasi orangtua-anak dan sebaliknya. Meskipun demikian, kelangsungan hubungan anak dan orang tua pada level praktisnya tidak dapat secara otomatis dan *taken for granted* selalu baik serta menyenangkan kedua belah pihak. Sebaliknya, untuk memperoleh relasi yang membahagiakan anak dan orangtua, diperlukan usaha yang kreatif dan sungguh-sungguh dari semua pihak yang terkait.

Dari sudut pandang seorang 'anak' yang sudah menikah dan memiliki anak pula, usaha yang harus dilakukan untuk mempertahankan relasi baiknya dengan orang tuanya menjadi suatu 'pekerjaan rumah' tersendiri. Dalam posisi seperti ini, dia berada di dalam bentuk relasi yang tidak sederhana. Keadaan akan menjadi semakin rumit, bila seseorang yang terlibat memiliki komitmen dengan institusi lain selain keluarga, misalnya sekolah dan tempat kerja. Pada kenyataannya, dalam masyarakat kontemporer saat ini semakin banyak kita dapatkan perempuan yang memiliki multi komitmen: pada keluarga, masyarakat, karir dan pendidikan.<sup>12</sup>

#### **D. Perempuan, Pendidikan dan Perubahan Struktur Ekonomi**

Pada zaman kolonial, pendidikan merupakan hak istimewa kaum penjajah, yang kemudian diperluas pada pribumi golongan tertentu yang menjadi penyangga kekuasaan kolonial. Perempuan merupakan kelompok terakhir yang dapat mengenyam pendidikan.<sup>13</sup> Pada era paska

---

<sup>12</sup> Lihat biografi para tokoh perempuan Muslim pada Hamdar M. Arraiyyah and Rosehan Anwar (Eds.), *Pemuka Agama Perempuan: Pemikiran dan Karyanya* (Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 2001). Serta perempuan yang aktif dalam berbagai organisasi di samping komitmen mereka terhadap keluarga dan karir. Sujatin Kartowijono, *Mencari Makna Hidupku: Bunga Rampai Perjalanan Sujatin Kartowijono* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983). KOWANI, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1978). PPMuslimat NU, *Sejarah Muslimat NU* (Jakarta: PP Muslimat NU, 1979).

<sup>13</sup> Sebagaimana yang dialami oleh R.A. Kartini, juga yang diamati oleh feminists Belanda Sitisioemandari Soeroto, *Kartini: Sebuah Biografi* (Jakarta: Gunung Agung, 1979).

kemerdekaan 1945, secara formal diskriminasi terhadap perempuan untuk mendapatkan kesempatan pendidikan di sekolah telah dihapus, namun karena minimnya fasilitas sekolah dan sumberdaya guru, pendidikan tetap menjadi institusi sosial yang langka dan diperebutkan. Dan perempuan, sekali lagi menjadi kelompok yang paling terakhir dapat mengakses pendidikan, khususnya di daerah pedesaan. Dengan dicanangkannya program wajib belajar 6 tahun dan kemudian ditingkatkan menjadi 9 tahun secara nasional, pemerintah mendirikan sekolah-sekolah hingga di daerah pelosok. Dengan modal pendidikan dasar ini banyak perempuan mulai merambah wilayah sosia-ekonomi yang baru, baik karena dipaksa keadaan atau atas dasar pilihan dan kehendaknya sendiri.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah Orde Baru Indonesia menggalakkan program pembangunan nasional yang bertumpu pada ekonomi industri. Sejak tahun 1970an berbagai pabrik bermunculan. Struktur ekonomi Indonesia mengalami pergeseran, dari agraris ke industri manufaktur. “Revolusi Hijau” yang menyentuh pada sektor pertanian, di samping keberhasilannya meningkatkan produksi bahan pangan selama beberapa dekade, ternyata menimbulkan banyak eksek yang merugikan. Revolusi hijau berhasil menemukan berbagai jenis bibit padi varietas unggul dan meningkatkan produksi beras, tetapi semuanya membutuhkan pemeliharaan yang melibatkan penggunaan bahan-bahan kimia dan teknologi baru. Dampak yang ditimbulkan adalah tercemarnya lingkungan, dan terganggunya ekosistem. Secara sosial ekonomi, jenis tanaman baru juga menyebabkan hilangnya mata pencaharian banyak petani perempuan di desa-desa, karena sistem panen tidak dapat dilakukan dengan menggunakan alat potong tradisional *ani-ani* yang biasa dipakai oleh kaum perempuan.<sup>14</sup> Dengan hilangnya pekerjaan di sawah, banyak perempuan muda meninggalkan kampung halaman untuk mencari penghidupan di pabrik-pabrik yang baru didirikan, meskipun dengan kontrak kerja yang sangat eksploitatif.<sup>15</sup> Sejalan dengan proses urbanisasi,

---

Susan Blackburn, “Western feminists observe Asian women: An example from the Dutch East Indies” In *Women Creating Indonesia The First Fifty Years*, edited by J. G. Taylor (Clayton, VIC: Monash Asia Institute, Monash University, 1997).

<sup>14</sup> Untuk keterangan lebih lanjut, baca Diane Wolf, *Factory Daughters: Gender, Household Dynamics and Rural Industrialization in Java* (Berkeley: University of California Press, 1992)..

<sup>15</sup> Perempuan mendapat gaji lebih rendah, tidak mendapat tunjangan kesehatan atau yang lain, kondisi tempat kerja yang tidak sehat, dan sebagainya. Susan Blackburn, “Gender interests and Indonesian democracy” In *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, edited by D. Bourchier and J. Legge (Clayton, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1994)..

trend mobilitas sosial-ekonomi perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pengalaman pendidikan dan kemandirian secara ekonomi yang dimiliki oleh kaum perempuan memberi pengaruh terhadap cara pandang mereka mengenai perkawinan dan hidup berkeluarga. Hingga pada akhir masa kolonial Belanda pada tahun 1940an, perkawinan anak-anak perempuan di bawah umur 15 tahun masih sangat umum. Tradisi keluarga di Jawa biasanya menganggap bahwa seorang anak perempuan sudah 'available' untuk dikawinkan begitu mendapatkan haidnya yang pertama, tanpa lebih jauh memikirkan dampak negatif dari perkawinan yang sangat dini tersebut. Stigma memiliki anak 'perawan tua' dan 'tidak laku' sangat menakutkan banyak keluarga Jawa. Untuk menghindari 'cela' itu, orangtua akan mengawinkan anak perempuan mereka sesegera mungkin.<sup>16</sup> Praktek perkawinan dini seperti ini sebenarnya sudah ditentang oleh banyak perempuan, termasuk yang paling pertama menentangnya adalah R.A. Kartini. Sebagian besar perempuan yang menentang tradisi ini pada masa-masa selanjutnya adalah mereka yang pernah mengenyam pendidikan.<sup>17</sup> Sejak tahun 1970an, bersamaan dengan semakin luasnya kesempatan pendidikan bagi perempuan, dan menguatnya ekonomi industri di Indonesia dengan ditemukannya sumber daya minyak, fenomena pergeseran cara pandang perempuan terhadap institusi perkawinan semakin nyata. Konsep 'cinta' dan 'persetujuan' yang semula tidak menjadi isu penting bagi perempuan dalam memasuki gerbang perkawinan pada dekade sebelumnya, kini menjadi dua prasyarat yang diinginkan oleh kaum perempuan pekerja sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Diane Wolf di Jawa Tengah dan Kathryn Robinson di Sulawesi Selatan.<sup>18</sup> Dari uraian ini tampak bahwa pendidikan merupakan

---

<sup>16</sup> Praktik perkawinan muda ini lebih banyak terdapat pada kalangan masyarakat Muslim. Susan Blackburn and Sharon Bessell, "Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth Century Indonesia" in *Indonesia* (63, April).

<sup>17</sup> Lihat penelitian berikut: Cora Vreede-De Stuers, *The Indonesian Women, Struggles and Achievements* (Mouton: The Hague, 1960). Susan Blackburn and Sharon Bessell, "Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth Century Indonesia" in *Indonesia* (63, April, 1997).

<sup>18</sup> Pendirian pabrik dan perusahaan pertambangan merubah sistem kerja perempuan muda di pedesaan, juga relasi antara orangtua dan anak gadis mereka yang bekerja. Diane Wolf, "Industrialization and the family: Women workers as mediators of family change and economic change in Java" In *Women and Mediation*, edited by S. van Bemmelen, et al. (Leiden: KITLV Press, 1992), 99-101. Kathryn Robinson, "Love and sex in an Indonesian mining town" In *Gender and Power in Affluent Asia*, edited by K. Sen and M. Stevens. London and New York: Routledge, 1998).

institusi sosial yang berpengaruh terhadap perubahan cara pandang seorang perempuan mengenai otoritas yang dimilikinya dan model perkawinan yang diinginkannya. Semakin banyaknya sosok perempuan berpendidikan dan bekerja yang menempati 'pos' istri pada keluarga masa kini mengajak kita untuk menengok kembali ideologi istri pengatur rumah tangga yang dianut oleh Negara Republik Indonesia.

### **E. Perkawinan, Rumah Tangga dan Karir: Kisah Tiga Perempuan**

Bagian ini mendiskusikan pengalaman empirik tiga orang perempuan dalam menjalankan kehidupan perkawinan, mengendalikan rumah tangga serta karir mereka. Pertama, ketiga responden menyatakan bahwa mereka pernah masuk dalam golongan 'perawan tua' kalau kita menggunakan rata-rata usia menikah pada awal tahun 1990an yang berkisar pada angka 22 tahun untuk perempuan,<sup>19</sup> karena mereka menikah di atas usia tersebut. Tia menikah pada usia 32 tahun, Diah 28 tahun, dan Anita menikah ketika berumur 34 tahun. Pada saat mereka memasuki gerbang rumah tangga, ketiganya sudah menyelesaikan pendidikan S1 (Anita bahkan sudah lulus S2), dan telah memiliki pekerjaan tetap yang memungkinkan mereka untuk dapat mandiri secara ekonomi. Ketika ditanyakan apakah perkawinan mereka atas dasar 'cinta' dan 'persetujuan,' mengingat mereka adalah perempuan berpendidikan dan berpenghasilan sebagaimana disinyalir oleh Robinson dan Wolf di atas, ketiganya sepatutnya dalam hal 'persetujuan' tetapi memiliki pengalaman dan pandangan yang berbeda mengenai persyaratan 'cinta'. Tia menuturkan pengalamannya sebagai berikut:

Aku sebetulnya waktu itu belum pingin betul untuk menikah ya, tetapi keluarga kentara sekali kalau menekan aku agar segera menikah, soalnya aku punya tiga orang adik perempuan yang semuanya sudah dewasa. Apalagi keluarga bapak dan ibuku Jawa tulen dari Yogya, meskipun sudah cukup lama di Jakarta. Aku belum lama putus dengan pacar lamaku, ketika aku ketemu dengan Himawan (pseudonym) yang kemudian menjadi suamiku. Dia itu salah satu klien perusahaan konsultan tempat dulu aku bekerja. Yah...karena timbul 'romance' di antara dia dan aku, aku keluar dari perusahaan lama dan alhamdulillah dapat pekerjaan di perusahaan konsultan manajemen yang lain. Mungkin saking kuatnya tekanan keluarga, juga kulihat Himawan oke-oke juga,

---

<sup>19</sup> Baca Susan Blackburn and Sharon Bessell, "Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth Century Indonesia" in *Indonesia* (63, April, 1997).

menikahlah aku, pada umur 32 tahun. Kalau dibilang berdasarkan cinta, waktu itu iya juga tapi...mungkin cinta kilat yang belum teruji. Sekarang mah beda, tanaman cinta itu kita yang berusaha menumbuh suburkan (Wawancara, 10 Mei 2004).

Berbeda dengan pengalaman Tia, Diah mengaku perkawinannya dengan Susanto adalah karena cinta, setelah mereka berpacaran selama tiga tahun. Meskipun mengaku karena cinta, Diah tidak menutupi bahwa dalam perjalanan perkawinannya dengan Susanto, ia mengalami keraguan akan kelanggengan perkawinannya:

Pernikahan saya dengan Susanto berdasarkan cinta dan persetujuan. Kami sudah berpacaran selama tiga tahun sebelum kami menikah. Tapi entahlah....saya kok merasa cinta itu bukannya semakin bersinar, tetapi malah meredup selama perjalanan perkawinan kami. Saya merasa kesulitan berkomunikasi dengan suami, saya mendapatkan sosok Susanto yang berbeda, gitu lho. Mungkin dia juga mendapati saya berubah ya... Paling tidak saya ingin bicara dari hati ke hati dengan suami tentang soal ini, tapi dia tidak pernah memberi respon, suami selalu menghindar kalau mau diajak omong. Bisa dikatakan komunikasi buntu, yang diomongkan terbatas urusan uang belanja, seragam sekolah anak, gitu-gitu saja. Saya nggak tahu apakah kalau nanti anak-anak sudah besar dan menikah semua, saya masih akan dapat mempertahankan perkawinan ini atau tidak. Saya toh dapat menghidupi diri sendiri. Kalau sekarang, terus terang saja, saya lebih berpikir untuk anak-anak (Wawancara, 12 Mei 2004).

Kisah perkawinan Anita lain lagi. Dimulai dari cinta sepihak, tetapi atas dasar persetujuan Anita. Cinta itu ditumbuhkembangkan dalam kehidupan perkawinan selanjutnya, walaupun tetap diakuinya mengalami pasang surut yang agak tajam, mungkin karena faktor usia suami yang beberapa tahun lebih muda, menurut pengakuan Anita:

Suami saya itu bekas mahasiswa saya lho. Waktu itu dia luar biasa dalam 'mengejar' saya. Setelah saya tantang dengan berbagai kendala yang mungkin akan dia hadapi kalau menjadi suami saya dan dia tetap keukeuh, ingin menikahi saya....ya sudah saya menikah saja dengan dia. Saya bukan tipe perempuan yang romantis ya..., walaupun teman-teman bilang saya punya potensi untuk itu, karena saya cantik (tertawa). Dulu juga saya pernah punya pacar, tapi menurut saya mereka semua tidak tahan uji ... Jadi bisa dikatakan saya menikah dulu itu bukan karena cinta, tapi karena 'keberanian' mahasiswa saya menghadapi tantangan yang saya ajukan. Entahlah kami dulu seperti orang nekat saja, keluarga dia

dan keluarga saya tidak menyetujui pernikahan kami, tapi kami jalan terus dan akhirnya ayah saya merestui. Saya membiayai sendiri pesta pernikahan kami, waktu itu suami saya pekerjaannya belum tetap, uang juga belum punya (Wawancara, 14 Mei 2004).

Tia, Diah dan Anita menyatakan bahwa sejak awal mereka sudah berniat untuk tetap bekerja meskipun sudah menikah dan beranak. Dan ketiganya juga berpendapat bahwa penghasilan mereka sangat berarti untuk menopang kehidupan keluarga mereka, yang kebetulan semuanya hidup di kota-kota besar di Jawa: Jakarta, Surabaya dan Bandung, dimana biaya hidup memang tinggi. Tia menambahkan betapa beruntungnya dia tetap bekerja karena pada saat terjadi krisis moneter di Indonesia pada penghujung tahun 1990an, dia menjadi penopang utama ekonomi keluarga karena suaminya terkena PHK. Diah menghitung kalau hanya mengandalkan pada penghasilan suaminya saja yang bekerja di kantor Pemda di Surabaya niscaya tidak akan cukup untuk membiayai pendidikan ketiga anaknya yang terdaftar di sekolah swasta Islam terkenal di kota tersebut. Anita bahkan mengakui sejak awal pernikahannya hingga saat ini, dia yang lebih berperan dalam soal keuangan keluarga, karena pekerjaan suami yang tidak tetap. Pada tahun 1998 suami Anita juga terkena PHK. Dari ketiga pengalaman perempuan ini, jelas sekali bahwa terjunnya mereka ke dunia kerja bukan sekedar aktualisasi diri atau untuk memuaskan ego mereka, melainkan juga berdasarkan kalkulasi logik kebutuhan hidup pada konteks mereka masing-masing.

Beranjak ke persoalan pengelolaan rumah tangga, mereka semua mengakui bahwa bukan hal yang mudah untuk merubah peran dan relasi gender dalam ranah domestik mereka. Meskipun ketiga perempuan yang menjadi responden studi ini menunjukkan bahwa secara ekonomis mereka relatif lebih kuat dan stabil dibandingkan dengan suami, secara konvensional pekerjaan rumah tangga tetap dianggap 'kewajiban' istri. Di sini nampak sekali 'norma' kepemimpinan rumah tangga dan pemberian nafkah oleh suami sebagaimana tersebut pada Q.S. Al-Nisā: 35: *al-rijāl qawwāmūn 'alā al-nisā'* ..... *bimā anfaqū min amwālihim*..., secara historis, sosiologis sudah 'terlanggar.' Lebih jauh, ketiga responden mengakui bahwa suami mereka tidak secara otomatis dan sukarela ikut terlibat dalam pengasuhan anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Setelah dengan berbagai daya upaya para perempuan ini meminta pengertian dan bantuan suami mereka untuk ikut membantu urusan 'rumah tangga', tidak semua suami menunjukkan iktikad baik. Dari tiga orang responden, hanya Tia yang 'beruntung', katanya:

Aku memang agak tegas ya orangnya. Sejak menikah aku katakan sama Himawan, kamu tahu aku bekerja di perusahaan yang menuntut disiplin tinggi. Tolong bantu aku. Cara yang paling gampang, bantu aku ngurusin rumah. Waktu kami punya anak, aku ulangi lagi permintaan itu. Alhamdulillah, Himawan mengerti, dia bisa mengerjakan semua urusan rumah tangga, dari nyuci, belanja, mandiin anak, apa saja, kecuali memasak. Waktu suamiku lagi kena PHK itu, wah anak-anak jadi lengketnya sama dia. Aku pernah tanya sama Himawan apakah dia malu kalau ketahuan oleh teman-temannya dia mengerjakan urusan rumah tangga, dia bilang tidak, ya sudah. Keterlibatan Himawan dalam mengasuh anak-anak dan urusan rumah tangga sangat membantu aku, baik saat sekolah sekarang ini, maupun ketika ngantor di Jakarta (Wawancara 15 Mei 2004).

Permintaan Diah dan Anita pada suami mereka untuk berbagi beban pada pengelolaan rumah tangga kurang mendapat respon yang positif. Diah mengaku suami hanya membantu mengantar dan menjemput anak sekolah, karena searah dengan kantor dimana dia bekerja, dan kadang-kadang mengantar berbelanja pada hari Sabtu atau Ahad kalau tidak ada acara TV yang menarik hati suaminya. Tidak adanya support dari suami dirasakan Diah turut menghambat perkembangan karirnya di dunia perguruan tinggi:

Saya merasa tertinggal dengan kawan-kawan yang lain. Saya nggak banyak mengikuti seminar atau konferensi yang diadakan di luar kota, karena saya nggak bisa mempercayakan anak-anak pada suami. Kalau saya terpaksa keluar kota, saya minta tolong ibu saya untuk menemani anak-anak. Kadang saya rasakan energi saya habis untuk ngurusin rumah, sementara pikiran ya...sumpek, sebel. Bagaimana mau mikir penelitian, mikir rumah saja nggak beres-beres. Jadi dosen tapi nggak berkembang. Kadang saya merasa saya dapat beasiswa sekolah ini karena mungkin Allah kasihan sama saya (tertawa). Selama tinggal di Australia ini, saya lihat suami mengalami sedikit perubahan, dia mau membantu mencuci baju, ya tinggal 'klik' to, kan keterlaluan kalau nggak mau. Tapi dia nggak kerasan tinggal di sini, dia akan segera pulang ke Indonesia, juga karena cutinya habis. Anak-anak akan tetap tinggal di sini sampai saya selesai kuliah nanti. Aku nggak tahu bagaimana nanti dia mau hidup di Surabaya, mungkin dia pulang ke rumah orang tuanya. Sikap suami saya itu kalau saya lihat memang mengikuti pola di keluarganya, sangat patriarkhis. Ibu mertua saya itu...waduuh takut banget sama bapak. Jadi dia kelihatan nggak seneng kalau saya nampak 'berani' atau 'lancang' kepada anaknya (16 Mei 2004).

Sejauh pengamatan para responden terhadap sikap suami mereka, para suami tersebut nampak tidak menunjukkan rasa bersalah kalau mereka tidak membantu istri dalam mengerjakan tugas rumah tangga, pada saat mereka telah menyaksikan kontribusi riil isteri mereka. Anita mengemukakan sikap suaminya sebagai berikut:

Rasa bersalah? Suami saya tidak pernah 'care' dengan urusan rumah tangga. Kalau pas nggak banyak tugas sih, saya senang-senang saja mengurus rumah, karena pada dasarnya saya memang senang memasak dan mengatur rumah. Tapi kalau lagi dikejar 'deadline' kesel juga lihat suami nongkrong saja di depan computer atau ngisik-isik mobil. Saya mesti berteriak-teriak, baru dia gerak. Lama-lama saya males berteriak, apa ya pantas saya setua ini bersikap begitu. Tapi kalau dalam aturan agama, bagaimana sih sebenarnya? Dalam keluargaku, ayahku juga nggak pernah tuh pegang sapu atau ngajak main kami (Wawancara, 25 Mei 2004).

Sebaliknya, para istri merasa 'menafkahi' keluarga adalah bagian dari kewajiban mereka sebagai ibu, apalagi melihat situasi keuangan suami yang pas-pasan, meskipun secara normatif tercantum dalam UU Perkawinan 1974, bahwa 'memberi nafkah' pada keluarga adalah kewajiban suami. Para perempuan ini meski memiliki penghasilan sendiri, mereka merasa 'berdosa' kalau penghasilan tersebut hanya mereka nikmati sendiri. Mereka mengaku tidak pernah 'memanjakan' diri dengan membeli barang-barang yang eksklusif merupakan kebutuhan pribadi mereka saja. Mereka membeli barang-barang 'feminin' seperti perhiasan, pakaian, tas, sepatu, dan kosmetik hanya sekedar untuk membuat penampilan mereka pantas dan tidak memalukan di tempat kerja.

Dari paparan pengalaman tiga perempuan ini dapat diketahui bahwa mengubah persepsi atas relasi dan peran gender dalam rumah tangga bukan pekerjaan yang mudah, pun bagi perempuan-perempuan yang memiliki pendidikan tinggi dan kemandirian ekonomi. Meskipun ketiga perempuan mengaku memiliki otonomi dalam menentukan perkawinannya, tetapi rupanya 'daya tawar' yang mereka miliki dalam rumah tangganya sendiri tidak sebesar yang diharapkan. Ideologi relasi gender tradisional yang meletakkan suami pada posisi 'sentral' dan 'menentukan' dan isteri pada posisi 'peripheral' dan 'tunduk', tanpa memandang betapa posisi sosial dan ekonomi perempuan telah banyak berubah, dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang luas, seperti keinginan bercerai dan apatisme, seperti kasus Diah. Bekal kemandirian ekonomi dan pendidikan tinggi, ternyata belum cukup ampuh untuk menaikkan posisi tawar Diah dan Anita dalam relasi gender mereka

dengan suami. Pada kasus Tia, nampak penjelasannya mengenai tanggungjawab lain yang diembannya di kantor dapat dimengerti oleh suaminya. Berdasarkan temuan ini, penulis berpendapat ada banyak faktor lain terkait, selain sikap assertif perempuan, dengan upaya pembongkaran relasi gender yang perlu penelitian lebih mendalam. Penelitian ini tidak menjangkau pada pembuktian adanya dugaan bahwa keengganan suami Diah dan Anita untuk ikut membereskan pekerjaan 'perempuan' (i.e. rumah tangga) adalah untuk menjaga 'harga dirinya' sebagai 'pemimpin' keluarga yang secara empirik telah tertantang karena lebih kuat dan stabilnya ekonomi para isteri.

#### **F. Menjaga Relasi Antar-generasi: “*Birr al-wālidayn*” Kewajiban Siapa?**

Dalam masyarakat komunal seperti di Indonesia, meskipun telah mengalami pergeseran, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai persekutuan dua orang saja, melainkan juga 'perkawinan' antar keluarga besar dari kedua mempelai. Salah satu konsekuensi dari cara pandang demikian ialah keharusan untuk menjaga hubungan baik dengan kedua keluarga, yang paling penting di antaranya adalah dengan mertua. Pada bagian ini akan dianalisis bagaimana ideologi tradisional relasi gender mempengaruhi pola-pola relasi antara menantu (perempuan) dengan orangtua dan mertua mereka, sebagaimana dialami oleh ketiga responden penelitian ini.

Secara simbolik peran vertikal seorang ibu diproyeksikan sebagai 'penjaga' budaya dan 'penghubung' antar generasi dalam masyarakatnya. Melalui sentuhan keibuannya, ia akan mewariskan nilai-nilai budaya, yang semula ia pelajari dari leluhurnya kepada anak turunya.<sup>20</sup> Dalam tataran ideologis, peran itu sangat penting bagi kelangsungan budaya dan tradisi masyarakat, tetapi dalam tataran praktis ekspektasi peran itu dapat sangat

---

<sup>20</sup> Lihat berbagai argumen yang dikemukakan untuk mendukung pandangan ini pada buku-buku berikut Elizabeth Martyn, *Gender, Nation in a New Democracy: Indonesian Women's Organizations in the 1950s* (Clayton, VIC: Department of Politics, Monash University, 2001). Bo Utas, *Women in Islamic Societies. Social Attitude and Historical Perspective* (London: Curzon Press, 1983). Lenore Manderson, "Right and responsibility, power and privilege: Women's roles in contemporary Indonesia" In *Kartini Centenary: Indonesian Women Then and Now* (Clayton, VIC: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1980). Naila Kabeer, "The quest for national identity: women, Islam and the state of Bangladesh" In *Women, Islam and the State*, edited by D. Kandiyoti (London: Macmillan, 1991). Valentine M. Moghadam (Ed.), *Gender and National Identity: Women and Politics in Muslim Societies* (London: Zed Books, 1994). Valentine M. Moghadam, *Identity, Politics and Women: Cultural Reassertions and Feminism in International Perspective* (Boulder: Westview Press, 1994).

membebani perempuan. Apalagi kalau dilihat, dinamika dan komposisi masyarakat tidak hanya melibatkan kaum perempuan, tetapi juga laki-laki. Kembali pada persoalan peran ‘penghubung’ antar generasi, anak-dengan orang tua, dan antar generasi silang antara menantu dan mertua, di sini kita dapatkan pembebanan peran yang berlebihan pada kaum perempuan, sebagaimana dialami oleh ketiga responden.

Tia mengakui bahwa dalam keluarga suaminya, dia adalah menantu yang ‘tidak favorit.’ Dibandingkan dengan saudara-saudara iparnya yang lain, ia yang paling jarang berkunjung ke rumah mertuanya di Bandung, walaupun secara finansial Tia adalah ‘penyumbang’ terbesar, seperti ungkapnya:

Mertuaku kayaknya paling nggak suka deh sama aku. Beberapa iparku kan tinggal di Bandung, ya tentu saja mereka akan lebih mudah dan sering mengunjungi mertua. Kalau lebaran, semua menantu perempuan pada sibuk masak dan beres-beres, aku lebih sering santai atau jalan-jalan. Lha sudah saben hari masak, di hari libur kan pingin istirahat. Soal ngirim uang, aku tuh bukan orang yang pelit. Terus terang, sumbanganku ke mertua itu jauh lebih banyak daripada yang aku berikan pada orang tuaku sendiri lho. Tapi ya...itu semua kayaknya nggak di ‘reken’ deh. Aku sih cuek saja, capek juga kadang mikirin yang gitu-gitu. Pernah waktu salah satu mertuaku sakit, ada iparku perempuan yang terus-menerus menunggu di Bandung sampai dia mbolos dari tempat kerjanya. Kayaknya yang lain juga mengharap aku akan berbuat yang sama. Ya nggak bisa dong aku mbolos kerja seenaknya, perusahaan tempatku bekerja itu disiplin banget, tapi juga ngasih gajinya gede. Aku bilang sama Himawan: “Eh kalian yang anak-anak kandungnya harusnya yang lebih banyak ngerawat dong, kok malah dibebankan pada kami, para menantu?” Himawan sebetulnya nggak pernah nyuruh aku untuk njagain orangtuanya, malah iparku saja yang kadang bikin aku nggak enak (Wawancara, 23 Mei 2004).

Pengalaman yang hampir serupa juga dialami oleh Diah, yang sempat tinggal dua tahun bersama mertuanya pada awal perkawinan mereka. Karena kesibukannya mengurus rumah tangga dan berkarir di perguruan tinggi, Diah merasa kehabisan waktu untuk bertandang ke rumah mertuanya. Apalagi, suaminya sendiri juga kurang menunjukkan minat untuk sering berkunjung ke rumah orangtuanya sendiri.

Meskipun kami tinggal sekota, tapi terus terang saya memang jarang sekali berkunjung ke mertua. Paling dua bulan sekali. Kalau saya berkunjung pun, belum tentu suami saya ikut, aneh to. Lha bagaimana, anaknya sendiri begitu, saya kan jadi nggak terpacu mencari

waktu. Dengan orangtua saya saja, lebih sering mereka yang datang ke rumah saya. Ibu saya selalu siap menemani anak-anak kalau pas saya ada acara di luar kota. Kadang saya berpikir juga, kapan ya berhenti ngrepotin orang tua.... Dulu, setelah menikah saya tinggal di rumah mertua, sebetulnya saya pingin di rumah ibu saja, tetapi suami nggak mau. Ya sudah, karena belum punya rumah ya terpaksa mau. Karena nggak bisa sering berkunjung, saya kadang telpon saja. Saya pernah dengar dari ipar, kalau mertua pernah 'ngrasani' kalau saya itu 'dumeh nyambut gawe' dan 'lupa kalau pernah tinggal serumah'. Mungkin saya memang agak keterlaluan ya. Nanti kalau pulang ke Indonesia, saya akan lebih sering berkunjunglah (Wawancara, 26 Mei 2004).

Pengalaman Anita dengan mertuanya berbeda dengan Tia dan Diah. Kalau pada awal perkawinannya mertua Anita tidak merestui, beberapa tahun kemudian, mertuanya menjadi supporter Anita yang paling dapat diandalkan. Kedekatan hubungan Anita dengan ibu mertua khususnya, kadang melebihi kedekatannya dengan orangtua sendiri. Seperti Diah, Anita menengarai banyak perilaku suaminya yang mencerminkan pola relasi gender yang tidak setara dalam keluarganya. Karena kedekatannya dengan ibu mertua, Anita merasa tidak sungkan untuk membicarakan 'perilaku' suaminya dengan ibunya, seperti kisahnya:

Hubunganku dengan Ibu mertua itu lucu, seperti teman saja. Dulu dia nggak setuju anaknya dapat aku, sekarang dia malah seperti mendapat teman. Ada apa-apa ngomongnya ke aku, soalnya dia nggak pernah bisa bicara dengan bapak mertuaku. Akhirnya aku juga biasa blak-blakan dengan ibu mertuaku. Dengan anaknya sendiri, dia tidak sedekat itu. Dengan orantuanya sendiri suamiku itu kurang 'care' apalagi dengan orangtuaku. Apalagi orangtuaku kayaknya belum bisa menerima dia sepenuhnya setelah sekian tahun kami berkeluarga. Suamiku itu sangat individualis dan juga egois, persis kayak bapaknya ternyata. Juga keras, kalau sudah ada maunya wahh kejar terus sampai dapat (Wawancara 29 Mei 2004).

Dari paparan pengalaman Tia, Diah dan Anita di atas, nampak bahwa perempuan tetap diharapkan untuk dapat mengelola hubungan vertikal, baik yang langsung dengan orangtuanya maupun silang dengan mertuanya. Pada saat mertua membutuhkan perhatian dan pelayanan intensif, seperti pada kasus Tia, kembali pihak perempuan, termasuk menantu perempuan, yang diharapkan dapat memenuhi tugas itu lebih daripada tuntutan kepada anak kandung mereka yang laki-laki. 'Keberanian' Tia untuk menyampaikan pendapatnya mengenai hal itu, berhasil mengurangi bebannya untuk 'mengorbankan' karir, karena di sana memang masih

ada anak-anak kandung lainnya. Selanjutnya mitos buruk mengenai hubungan menantu perempuan dengan mertua perempuan diruntuhkan dengan intimnya relasi Anita dengan ibu mertuanya.

Kurang terpeliharanya hubungan baik antara anak dengan orangtua, atau menantu dengan mertua disebabkan antara lain karena kesibukan anak, seperti terungkap pada kasus Tia dan Diah. Oleh karena keduanya tidak dapat melakukan kunjungan fisik yang lebih sering, atau membantu urusan dapur mertua pada hari raya, mereka menggantinya dengan memberikan bantuan material dan finansial, juga komunikasi melalui telepon. Di sini kita dapatkan ada kesenjangan ekspektasi antara anak yang muda (Tia dan Diah) di satu pihak, dengan mertua mereka di pihak yang lain. Anak berharap, pembicaraan lewat telepon dapat menggantikan kunjungan fisik pada saat mereka sibuk, dan kiriman uang, paling tidak akan menjadi pertanda bahwa mereka tetap menaruh perhatian kepada keadaan dan kebutuhan mertua. Harapan anak tersebut diatas rupanya kurang dapat dimengerti oleh mertua. Keterlibatan fisik menantu perempuan dalam rumah tangga mertua kelihatan lebih dihargai daripada usaha-usaha yang lain, sebagaimana diungkapkan oleh Tia. Sementara itu, nampak dari pengalaman ketiganya pengertian untuk 'tidak sempat berkunjung' lebih banyak diberikan pada laki-laki, bahkan terhadap anak kandung sendiri. Laki-laki sedikit banyak terbebaskan dari kewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan orangtua dan mertua, yang sebenarnya tidak sesuai dengan pesan agama Islam. Tuntutan keharusan berbuat baik kepada orangtua (dan mertua) adalah ditujukan kepada semua anak, laki-laki dan perempuan.

## **G. Penutup**

Sebagai kesimpulan dari studi singkat ini dapat disampaikan beberapa catatan berikut. Bagi ketiga perempuan responden, otonomi dan otoritas mereka untuk menentukan perkawinan, lebih penting daripada adanya faktor 'cinta,' sebagaimana diungkap oleh Anita dan Tia. Perkawinan berdasarkan cinta, ternyata juga tidak menjamin mulusnya perjalanan perkawinan mereka (kasus Diah), dan bahwa kesemaran cinta dalam kehidupan berumah tangga lebih banyak tergantung pada proses 'pemeliharaan'nya pada paska upacara perkawinan (Tia dan Anita). Catatan penting lain berdasarkan pengalaman ketiga perempuan tersebut di atas adalah bahwa perubahan status secara vertikal di wilayah publik (pendidikan S3 dan karir yang mapan) yang dicapai oleh perempuan jauh lebih cepat dari pada capaian mereka di wilayah domestik. Sampai dengan pada tahun 1950an, jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan

tinggi masih sangat sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Namun demikian, dari penelitian ini nampak jelas bahwa kenaikan status sosial-ekonomi mereka, tidak dengan sendirinya menjadi jaminan bagi keberhasilan mereka dalam merubah struktur relasi gender dalam keluarga intinya, sebagaimana ditunjukkan pada pengalaman Diah dan Anita. Dengan kata lain, rigiditas atau resistensi atas perubahan status dan peran perempuan di dalam ranah domestik lebih kuat dari pada pada wilayah publik. Keberhasilan Tia untuk merubah relasi gender dalam keluarga inti dengan suaminya, selain karena ketegasan sikapnya juga faktor sikap suami yang adaptif. Studi ini merekomendasikan agar dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai perubahan persepsi, sikap dan perilaku para suami dalam kaitannya dengan upaya penataan ulang peran dan relasi gender yang lebih adil bagi semua anggota keluarga. Islam melihat bahwa hubungan relasi dalam rumah tangga hendaknya ditandai dengan *mawaddah* dan *rahmah* untuk mencapai *sakīnah*; untuk itu diperlukan usaha yang serius bagaimana mewujudkan konsep-konsep religius itu dalam konteks keluarga Muslim masa kini sehingga sesuai dengan tuntutan zaman yang berubah.

Dalam persoalan menjaga hubungan baik dengan mertua, kembali perempuan mendapatkan beban tambahan. Tuntutan berbuat baik yang dihadapkan kepada menantu perempuan seringkali lebih berat daripada kepada anak laki-laki kandung mereka sebagaimana ditunjukkan oleh ketiga responden. Ditinjau dari analisis relasi gender, jelas hal ini membuat para perempuan tidak hanya menanggung beban ganda, tetapi multi beban. Kalau kita menengok pesan Al-Qur'an pada QS. Luqmān 14-15, serta QS. Al-Isra 23-24 jelas sekali bahwa perintah berbuat baik, menghormati, mengasihi dan mendoakan kedua orangtua, ditujukan pertama kali kepada anak kandung, anak yang disusui oleh ibunya. Maka tuntutan yang berlebihan kepada menantu perempuan untuk berbakti kepada mertua, apalagi tanpa dibarengi dengan tuntutan serupa terhadap anak kandung sendiri, kurang sesuai dengan pesan Islam, dan sangat membebani perempuan. Karena urusan perkawinan dan keluarga adalah dua hal yang sangat berdekatan dengan agama, maka diharapkan kaum agamawan dapat memberikan kontribusi positif bagi penguraian multi beban kaum perempuan ini.

### Daftar Pustaka

- Afshar, Haleh. 1998. *Islam and Feminism: An Iranian Case-study*. New York: Palgrave.
- Anwar, Z. 2002. Multi-Fundamentalism and Feminist resistance in Mauritius. In *Muslim Feminism and Feminist Movement: South East Asia*, edited by A. Samiuddin and R. Khanam. Delhi, India: Global Vision Publishing House.
- Arraiyyah, Hamdar M, and Rosehan Anwar, eds. 2001. *Pemuka Agama Perempuan: Pemikiran dan Karyanya*. Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI.
- Beckford, James A. 1989. *Religion and Advanced Industrial Society*. London: Unwin Hyman.
- Blackburn, Susan. 1994. Gender interests and Indonesian democracy. In *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, edited by D. Bouchier and J. Legge. Clayton, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- . 1997. Western feminists observe Asian women: An example from the Dutch East Indies. In *Women Creating Indonesia The First Fifty Years*, edited by J. G. Taylor. Clayton, VIC: Monash Asia Institute, Monash University.
- Blackburn, Susan, and Sharon Bessell. 1997. Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth Century Indonesia. *Indonesia* (63, April).
- Djajadiningrat-Nieuwenhuis, Madelon. 1987. Ibuism and priyayization: Path to power. In *Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions*, edited by E. Locher-Scholten and A. Niehof. Dordrecht-Holland: Foris Publication.
- Djamal, Chamsiah. 2000. Women in the informal sector: A forgotten workforce. In *Indonesian Women: The Journey Continues*, edited by M. Oey-Gardiner and C. Bianpoen. Canberra: Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University.
- Durkheim, Emile. 1973. *Emile Durkheim: On Morality and Society*. Edited by R. Bellah. Chicago: University of Chicago Press.
- Engels, Frederick. [1884, 1891] 1973. *The Origin of the Family, Private Property and the State*. New York: International Publishers.
- Foley, Rebecca C. 2001. The Challenge of Contemporary Muslim Women Activists in Malaysia, School of Political and Social Inquiry, Monash University, Clayton, VIC.

- Geertz, Clifford. 1976. *The Religion of Java*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Kabeer, Naila. 1991. The quest for national identity: women, Islam and the state of Bangladesh. In *Women, Islam and the State*, edited by D. Kandiyoti. London: Macmillan.
- Kartowijono, Sujatin. 1983. *Mencari Makna Hidupku: Bunga Rampai Perjalanan Sujatin Kartowijono*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kazemzadeh, Masoud. 2002. *Islamic Fundamentalism, Feminism, and Gender Inequality in Iran under Khomeini*. Lanham, Maryland: University Press of America.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- KOWANI. 1978. *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Manderson, Lenore. 1980b. Right and responsibility, power and privilege: Women's roles in contemporary Indonesia. In *Kartini Centenary: Indonesian Women Then and Now*. Clayton, VIC: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Martyn, Elizabeth. 2001. *Gender, Nation in a New Democracy: Indonesian Women's Organizations in the 1950s*, Department of Politics, Monash University, Clayton, VIC.
- Marx, Karl, and Frederick Engels. 1964. *On Religion*. New York: Schocken Books.
- Moghadam, Valentine M. 2003. *Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East*. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Moghadam, Valentine M., ed. 1994. *Gender and National Identity. Women and Politics in Muslim Societies*. London: Zed Books.
- . 1994. *Identity, Politics and Women. Cultural Reassertions and Feminism in International Perspective*. Boulder: Westview Press.
- Mukhtar, Darmiyanti. 1999. *The Rise of the Indonesian Movement in The New Order State*, Murdoch University, Perth, Western Australia.
- Mukmin, Hidayat. 1980. *Beberapa Aspek Perjuangan Wanita di Indonesia. Suatu Pendekatan Diskriptif Komparatif*. Bandung: Binacipta.
- Nakamura, Hisako. 1983. *Divorce in Java: A Study of the Dissolution of Marriage Among Javanese Muslims*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ong, Aihwa, and Michael G. Peletz, eds. 1995. *Bewitching Women, Pious Men. Gender and Body Politics in Southeast Asia*. Berkeley:

- University of California Press.
- PP Muslimat, NU. 1979. *Sejarah Muslimat NU*. Jakarta: PP Muslimat NU.
- Robinson, Kathryn. 1998. Love and sex in an Indonesian mining town. In *Gender and Power in Affluent Asia*, edited by K. Sen and M. Stivens. London and New York: Routledge.
- . 2001. Gender, Islam and culture in Indonesia. In *Love, Sex and Power*, edited by S. Blackburn. Melbourne: Monash University Press.
- Soeroto, Sitisoesmandari. 1979. *Kartini: Sebuah Biografi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sullivan, Norma. 1994. *Masters and Managers: A Study of Gender Relations in Urban Java*. St Leonards, NSW: Allen & Unwin.
- Suryochondro, Sukanti. 1984. *Potret Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Utas, Bo. 1983. *Women in Islamic Societies. Social Attitude and Historical Perspective*. London: Curzon Press.
- Vreede-De Stuers, Cora. 1960. *The Indonesian Women, Struggles and Achievements*. The Hague: Mouton.
- Wieringa, Saskia. 1995b. The matrilinearity and women's interests: the Minangkabau of Western Sumatera. In *Subversive Women. Women's Movements in Africa, Asia, Latin America and the Caribbean*, edited by S. Wieringa. London: Zed Books.
- Wolf, Diane. 1992a. *Factory Daughters: Gender, Household Dynamics and Rural Industrialization in Java*. Berkeley: University of California Press.
- . 1992b. Industrialization and the family: Women workers as mediators of family change and economic change in Java. In *Women and Mediation*, edited by S. van Bemmelen, et al. Leiden: KITLV Press.
- Yang, Li-shou, Arland Thornton, and Thomas Fricke. 2000. Religion and family formation in Taiwan: The decline of ancestral authority. In *Family, Religion and Social Change in Diverse Societies*, edited by J. G. Pankhurst and S. K. Houseknecht. Oxford: Oxford University Press.
- Zenrif, M.F. 2004. Kepemimpinan Keluarga dalam Kajian Kontekstual. *Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam* 3 (1):45-65.